

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Sejalan dengan bertumbuhnya pemerintahan di Indonesia, berkembang pula dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Keinginan memiliki pengelolaan dalam pemerintahan yang baik sejalan dengan kinerja nyata pada pemerintah.

Bangsa Indonesia pada dasarnya memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, itulah salah satu tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertulis dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia (RI) Tahun 1945. Cara untuk memajukan kesejahteraan umum adalah dengan melaksanakan suatu pemerintahan yang baik untuk tercapainya masyarakat yang sejahtera, berkeadilan dan berkemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemerintahan yang baik harus sejalan dengan kinerja dalam melakukan tugas pemerintah. Terdapat tiga elemen yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pemerintahan yang baik yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi merupakan bagian dari keterbukaan proses kinerja pemerintah dalam melaksanakan tugasnya terhadap publik. Partisipasi merupakan dimana adanya kontribusi dari masyarakat terhadap keikutsertaannya dalam proses kinerja pemerintah. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban kinerja pemerintah terhadap publik.

Pemerintah sangat dibutuhkan untuk memberikan dorongan yang lebih kuat bagi jalannya pergerakan daerah. Dinyatakan dalam bentuk mengoptimalkan Pengelolaan potensi daerah dan sumber daya manusia yang memberikan manfaat terhadap masyarakat. Hal tersebut dapat terlaksana jika segala sesuatunya dilakukan secara baik dengan efektif dan efisien.

Undang-Undang No 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, dengan peraturan ini maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam satu kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan kata lain, pemerintah pusat melalui otonomi daerah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk mengoptimalkan daerahnya dengan mengelola kekayaan daerahnya sebaik mungkin demi kemakmuran rakyat.

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Penerapan otonomi daerah yang luas saat ini bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada sehingga dapat memacu peningkatan aktivitas di daerah yang pada akhirnya meningkatkan kinerja pemerintah.

Pemerintah daerah Kota Bandung merupakan salah satu pemerintah yang mulai berkembang baik dari segi pembangunan maupun tata kelola pemerintahan. Pada setiap daerah terdapat karakteristik yang berbeda-beda,

sehingga penamaan nomenklatur Dinas tiap daerahnya akan berbeda. Di Kota Bandung sendiri terdapat 18 Dinas dalam pelaksanaan teknis kinerja daerah.

Salah satunya Dinas Pendidikan Kota Bandung (DISDIK) merupakan penyelenggara pada bidang Pendidikan di kota Bandung yang berbentuk pemerintahan. Dinas ini mengatur penyelenggaraan, pelayanan dan bagaimana cara meningkatkan kebutuhan Pendidikan daerah kota Bandung.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Permendagri No.33 Tahun 2017). APBD merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintah yang berkaitan dengan uang dimana pada saat tertentu manfaatnya bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Dalam struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) proses pengeluaran anggaran dipergunakan untuk membangun kesejahteraan pelayanan oleh pemerintah terhadap publik.

Dalam realisasinya masih banyak terdapat Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Penyerapan anggarannya belum maksimal menyebabkan kurang optimalnya kinerja pemerintah. Disisi lain penyerapan anggaran merupakan suatu hal yang vital guna mendorong proses pembangunan sumber daya yang dapat membangun kinerja pemerintah secara lancar.

Salah satu faktor penyebab penyerapan anggaran belum maksimal adalah dikarenakan masih terdapatnya kehati-hatian dan keraguan yang

berlebihan dalam menggunakan anggaran sehingga memicu untuk terjadinya penyerapan anggaran yang belum maksimal hingga 100%. Pemerintah yang baik merupakan pemerintah yang dapat merealisasikan seluruh anggaran dengan efektif serta efisien bagi kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut Dinas Pendidikan Kota Bandung pada Anggaran Belanja Tidak langsung masih terdapat belum terealisasikan dengan maksimal 100%, serta terdapat naik turunnya presentase dimana realisasi penyerapan anggaran pada tahun 2012 lebih besar dibandingkan dengan 2016. Untuk lebih jelasnya mengenai berbandingan anggaran Tidak Langsung Dinas Pendidikan Kota Bandung serta realisasinya pada Tahun Anggaran 2012-2016 dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 1.1 Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Pada Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2012-2016

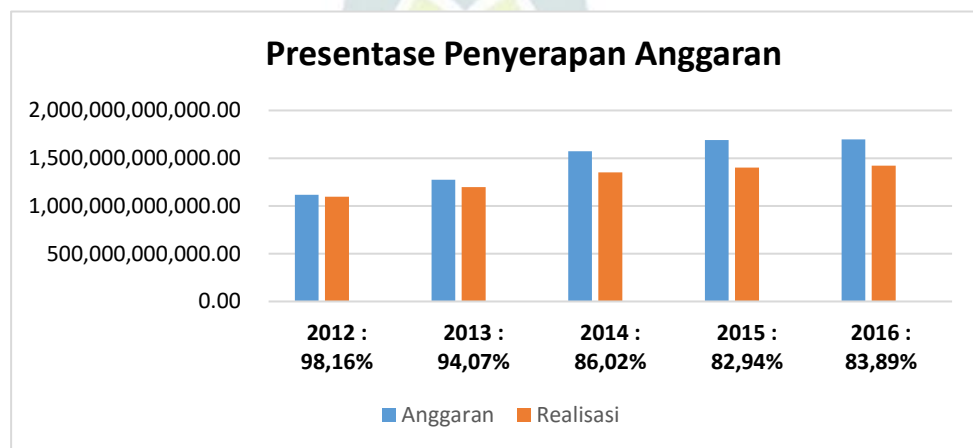
No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2012	1,118,181,892,345.37	1,097,635,879,292.00	98.16
2	2013	1,273,424,590,034.00	1,197,882,949,743.00	94.07
3	2014	1,572,323,694,464.00	1,352,516,500,604.00	86,02
4	2015	1,689,744,528,590.08	1,401,419,769,436.00	82,94
5	2016	1,696,784,958,845.00	1,423,366,556,131.00	83,89

Sumber : DISDIK Tahun 2012-2016

Tabel 1.4 merupakan data penyerapan anggaran belanja tidak langsung Dinas Pendidikan Kota Bandung dari mulai tahun 2012–2016, terlihat pada tahun 2012 penyerapan anggaran belanja tidak langsung hampir mencapai

100% tetapi pada tahun 2013 – 2015 mengalami penurunan setiap tahunnya dari total presentase 98,16% turun pada 82,94%, terdapat penurunan sebesar 15,22%. Walaupun pada tahun 2016 mengalami kenaikan kembali sebesar 0,95%, dan total menjadi sebesar 83,89% tetapi penyerapan anggaran pada tahun 2012 masih lebih besar dibandingkan pada tahun 2016.

Grafik 1.1 Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Pada Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2012-2016



Grafik 1.1 merupakan presentase dari penyerapan anggaran belanja tidak langsung Dinas Pendidikan Kota Bandung mulai dari tahun 2012 – 2016. Terlihat sekali anggaran dan realisasi penyerapan anggaran oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung yang masih belum mencapai 100 % dalam 5 tahun.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai analisis penyerapan anggaran. Judul yang diangkat peneliti sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah **“ANALISIS PENYERAPAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH DI DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG TAHUN 2012-2016”**

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi fokus penelitiannya berkaitan dengan penyerapan anggaran belanja tidak langsung yang belum maksimal dan terdapat presentase naik turun pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil penulis, dapat disusun secara spesifik ke dalam pertanyaan (Research Question) sebagai berikut :

“Bagaimana analisis penyerapan anggaran pendapatan belanja daerah di dinas pendidikan kota bandung tahun 2012-2016 ?.”

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah supaya mengetahui bagaimana analisis penyerapan anggaran pendapatan belanja daerah di dinas Pendidikan kota bandung tahun 2012-2016.

1.5. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis
 - a. Sebagai khasanah pengembangan intelektual penulis di bidang keilmuan Administrasi Publik mengenai analisis penyerapan anggaran di Dinas Pendidikan Kota Bandung.

- b. Sebagai acuan peneliti-peneliti selanjutnya dalam pembahasan yang berkaitan dengan penyerapan anggaran

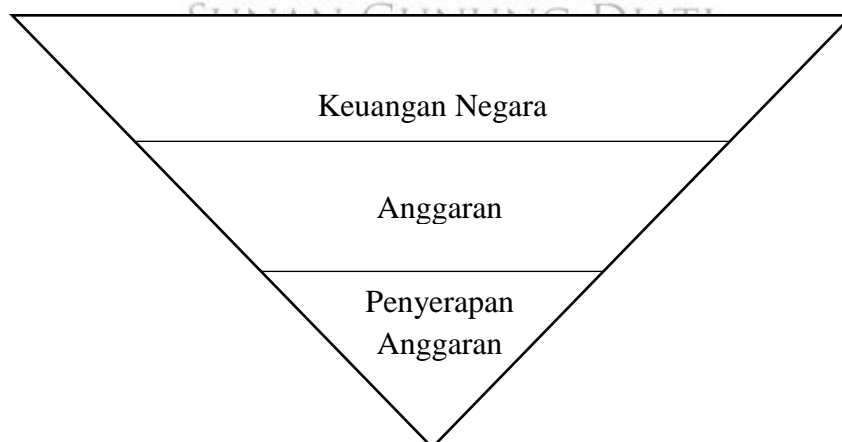
2. Praktis

- a. Diharapkan dapat dijadikan evaluasi bagi Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam rangka mengoptimisasikan penyerapan anggaran sehingga apa yang menjadi tujuan Dinas Pendidikan Kota Bandung akan mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.
- b. Hasil penelitian ini sebagai bentuk pengabdian masyarakat kepada Kota Bandung.

1.6. Kerangka Pemikiran

Konsep kerangka pemikiran yang penulis gunakan adalah konsep segitiga terbalik, konsep ini dimulai dari *Grand Theory* yaitu Keuangan Negara, *Middle Theory* yaitu Anggaran, dan *Oprasional Theory* yaitu Penyerapan Anggaran.

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual



Sumber : Data diolah peneliti 2018

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa:

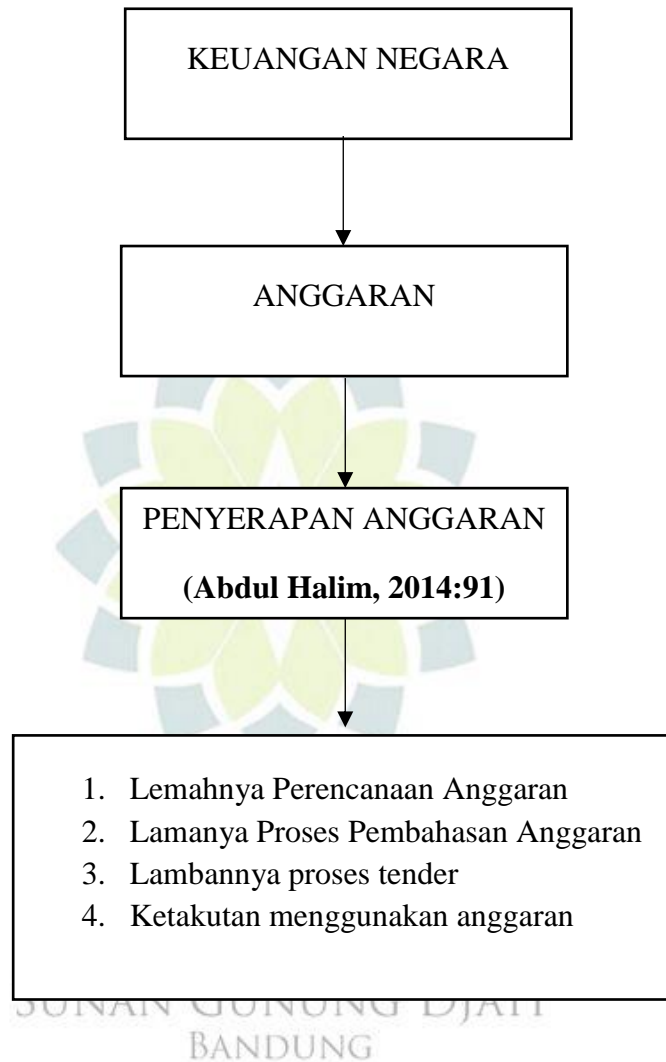
Grand Theory yang peneliti gunakan Menurut Sumarsono (2010:35) Keuangan Negara adalah hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Adapun *Middle Theory* yang peneliti gunakan Menurut Yuswar J.B (2005) yang dikutip oleh Anggara (2016:160) Anggaran merupakan hasil perencanaan yang berupa daftar mengenai bermacam-macam kegiatan terpadu, baik yang berkaitan dengan penerimaan maupun pengeluaran yang dinyatakan dalam satuan uang jangka waktu tertentu, umumnya satu tahun.

Dan yang terakhir *Operasional Theory* yang peneliti gunakan Penyerapan anggaran menurut Abdul Halim (2014:84) adalah realisasi dari anggaran, secara umum penyerapan anggaran yang dimaksud adalah pencapaian dari suatu estimasi yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dipandang pada suatu saat tertentu, maka penyerapan anggaran disini dapat diartikan sebagai pencairan atau realisasi anggaran sesuai yang tercantum dalam laporan realisasi anggaran pada saat tertentu. Atau secara sederhana penyerapan anggaran dapat diartikan secara sederhana yaitu membandingkan anggaran dengan realisasinya.

Apabila digambarkan, kerangka teori dari penelitian ini akan terlihat sebagai berikut :

Gambar 1.2 Kerangka Teori



Sumber : Data diolah Peneliti 2018

1.7. Proposisi

Analisis penyerapan anggaran pendapatan belanja daerah di Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam pelaksanaannya akan baik jika memenuhi 4 (empat) dimensi dan memperbaiki lemahnya perencanaan anggaran, lamanya proses pembahasan anggaran, lambannya proses tender dan ketakutan dalam menggunakan anggaran.